

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA SISTEM PIDANA ADAT	
2.1. Sistem Hukum Indonesia.....	13
2.2. Pengertian Hukum Adat.....	14
2.3. Sistem Hukum Pidana Adat.....	18
2.4. Pelanggaran Adat.....	19
2.5. Pertanggungjawaban Pidana Adat.....	21

2.6. Delik Adat.....	23
2.7. Klasifikasi Beberapa Sikap-Tindak Yang Merupakan Kejahatan.....	25
2.8. Reaksi Terhadap Delik Adat.....	27
2.9. Cara Penyelesaian Delik Adat.....	29
BAB III: KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT BADUY	
3.1. Masyarakat Adat Baduy.....	31
3.2. Kependudukan dan Aktivitas Perekonomian Masyarakat Adat Baduy.....	34
3.3. Agama dan Ideologi Masyarakat Adat Baduy.....	36
3.4. Sistem Pemerintahan Masyarakat Adat Baduy.....	37
3.5. Larangan Adat Masyarakat Adat Baduy Dalam.....	41
BAB IV: SISTEM PIDANA ADAT DI MASYARAKAT BADUY DALAM	
4.1. Sistem Hukum Pidana Formil Adat Baduy Dalam.....	43
4.2. Hukum Pidana Materil Adat Baduy Dalam.....	45
4.3. Sistem Pidana Adat Pada Masyarakat Adat Baduy Dalam.....	47
4.3.1. Asas Ultimum Remidium.....	48
4.3.2. Asas Restorative Justice.....	48
4.3.3. Asas Personalitas.....	49
4.3.4. Asas Teritorial.....	50
4.3.5. Asas Legalitas.....	51
4.3.6. Tindak Pidana Pencurian.....	51
4.3.7. Tindak Pidana Penipuan.....	51

4.3.8. Tindak Pidana Pembunuhan.....	52
4.3.9. Sengketa Tanah.....	53
4.4. Aturan Yang Diberikan Bila Masyarakat Adat Baduy Dalam Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana di Luar Wilayah Adatnya.....	53

BAB V: PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	68
---------------------	----

LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak, Banten Nomor 32 Tahun 2001
2. Yurisprudensi MA Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985
3. Yurisprudensi MA Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991
4. Surat Pengantar
5. Foto-Foto
6. Hasil Wawancara